

DAFTAR PUSTAKA

- Baguna, N.L. 2017. Analisis Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Tetap Pada PT.Bank Rakyat Indonesia Kantor. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*. 12(2) : 329.
- Ketentuan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 541/KMK.04/2000. *Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Tempat Pembayaran Pajak, Tata Cara Pembayaran, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Serta Tata Cara Pemberian Angsuran Atau Penundaan Pembayaran pajak.*
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan Edisi Revisi*. Andi Offset. Yogyakarta.
- Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-16/PJ Tahun 2016. *Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.*
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2007. *Kriteria Orang Pribadi Yang Nyata-Nyata Tidak Wajib Menyampaikan SPT Tahunan PPh.*
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.03/2008. *Penetapan Bagian Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan Dari Pegawai Harian dan Mingguan Serta Pegawai Tidak Tetap lainnya Yang Tidak Dikenakan Pemotongan Pajak Penghasilan.*
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016. *Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak.*

Putri, N.Z.A. 2020. Analisis Value For Money Pada Kinerja Keuangan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. *Skripsi*. Program S1 Akuntansi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel. Surabaya.

Suparmono, dan Damayanti. 2010. *Perpajakan Indonesia*. Andi Offset. Yogyakarta.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. *Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Lembar Negara Republik Indonesia. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. *Harmonisasi Peraturan Perpajakan*. Lembar Negara Republik Indonesia. Jakarta.

Zuana, K.R .2014. Sistem Informasi Pemotongan PPh 21 Atas Gaji Karyawan PT. Rajawali Tehnik. *Jurnal CompuTech & Bisnis* 8(2): 115.